

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utara, II,
Gedung Diklat II Lantai Dasar, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman : diskan.natunakab.go.id, Pos-el diskan@natunakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025. Renja ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain Rencana Kerja Tahun 2025, dalam dokumen Renja ini juga dijelaskan hasil atau capaian kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 dan evaluasi Tahun 2024 atau tahun berjalan dari triwulan I sampai triwulan II.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Natuna pada masa sekarang dan yang akan datang.

Ranai, 30 Agustus 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	26
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..	27
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	28
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V. PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel II.1. Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2023	8
Tabel II.2. Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023	8
Tabel II.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022 – 2023	9
Tabel II.4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023	11
Tabel II.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 Triwulan I dan II	14
Tabel II.6. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2023	18
Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025	28
Tabel IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025	33
Tabel IV.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan UPTD Balai Benih Ikan Tahun 2025	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dan per tanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dari penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan tujuan organisasi serta cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perencanaan bukanlah sesuatu yang statis akan tetapi lebih bersifat dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga merupakan suatu siklus berkelanjutan yang akan mendasari semua organisasi utamanya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Menindak lanjuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, telah disiapkan dan disusun rencana kerja (Renja) guna mendukung dan mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Natuna. Penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan bentuk konkrit yang akan menjadi arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah

yang bersangkutan. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini merupakan dokumen yang akan mengarahkan pelayanan dan pembangunan daerah di bidang perikanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan serta akan menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu: (1) kemana pelayanan Dinas Perikanan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai di tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah dijelaskan tentang kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada aturan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- e. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan;
3. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu sampai Hilir; dan
4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Dalam Batas Kewenangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 361).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pada Tahun 2025;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan program dan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan kinerja instansi Pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,** berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;** berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan Tahun 2025.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;** berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2025.
- Bab V : Penutup,** berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Natuna adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan. Tercapai tidak nya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa rencana Kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2023 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 2 (dua) tujuan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang mendukung indikator kinerja utama Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program yang mendukung kinerja utama, yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Untuk mencapai target kinerja Tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna melakukan berbagai upaya agar target kinerja terealisasi dengan baik. Selain anggaran yang tersedia, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, masyarakat, Koordinator Lapangan, dan Penyuluh Perikanan Bantu serta didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar) hasil perikanan. Pembentukan kelembagaan atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan turut mendukung tercapainya realisasi tersebut.

Capaian kinerja yang mendukung indikator kinerja utama Dinas Perikanan yang dievaluasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.1.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan	Ton	139.331,64	139.468,64	100,09
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	427,27	434,58	101,71

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dimana capaian persentase produksi perikanan sebesar 100,09% dan persentase produksi olahan produk perikanan mencapai 101,71%. Jumlah produksi perikanan merupakan penjumlahan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya, sedangkan Jumlah produksi olahan produk perikanan merupakan jumlah produksi olahan yang di produksi oleh unit pengolahan ikan atau pokhlaras yang ada di Kabupaten Natuna. Nilai produksi tersebut merupakan laporan produksi dari bidang yang diperoleh dari koordinator lapangan Dinas Perikanan yang ada di kecamatan. Secara detail jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.2.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP,
JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN JUMLAH
PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN
TAHUN 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	135.170,96	135.171,42	100,00
2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.160,68	4.297,22	103,28
3.	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	427,27	434,58	101,71

Selain melihat tingkat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan, pengukuran atau capaian kinerja Dinas Perikanan juga diukur dengan membandingkan realisasi pada Tahun 2022 dengan realisasi Tahun 2023. Perbandingan realisasi ini diharapkan dapat melihat peningkatan jumlah produksi perikanan yang telah dicapai, sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk meningkatkan produksi perikanan ditahun-tahun selanjutnya. Nilai produksi yang disajikan pada **Tabel.II.2** diatas diperoleh dari tiap-tiap bidang yang membidangi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana nilai tersebut merupakan rekapan data produksi Tahun 2023 yang diperoleh dari tiap-tiap kecamatan. Dibawah ini dapat dilihat perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

TABEL II.3.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan	Ton	139.138,66	139.468,64
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	526,29	434,58

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menargetkan jumlah produksi perikanan pada Tahun 2023 adalah sebesar 139.331,64 Ton, dimana angka tersebut merupakan target dari jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 135.170,96 Ton dan target jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 4.160,68 Ton. Pada Tahun 2023 capaian jumlah produksi perikanan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dimana perbandingan antara target dan realisasi produksi perikanan dapat dilihat pada tabel diatas. Selain dari jumlah produksi perikanan, tabel diatas juga menjelaskan perbandingan antara target dan realisasi produksi olahan produk perikanan dimana realisasi produksi olahan produk perikanan sebesar 434,58 Ton, meskipun realiasi menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2022, tetapi telah melebihi target pada Tahun 2023.

TABEL II.4.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah								
							Rp (Renja)		Rp (P DPA)		I	II	III	IV															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretaria tan yang sesuai SOP	Person	90	41.461.448.085	288	6.398.636.724	77	100.000.000	77	52.100.000	0	1.302.835	0	8.121.501	77.75	19.021.535	0	15.349.221	77.75	43.795.092	101	84	366	5.442.431.816	408	15	Dinas Perikanan
		Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81	500.000.000	80.71	31.124.966	77	100.000.000	77	52.100.000	0	1.302.835	0	8.121.501	77.75	19.021.535	0	15.349.221	77.75	43.795.092	101	84	366	5.442.431.816	408	15	Dinas Perikanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	500.000.000	2	31.124.966	2	50.000.000	2	52.100.000	0	1.302.835	2	8.121.501	0	19.021.535	0	15.349.221	2	43.795.092	100	84	4	74.920.058	33	15	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretaria tan yang sesuai SOP	Person	90	41.461.448.085	288	13.666.790.155	85	6.297.796.517	85	7.995.097.954	100	1.537.652.847	100	2.024.062.872	100	1.561.223.912	100	1.444.396.398	100	7.758.222.839	118	97	388	21.425.812.994	431	52	Dinas Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	27.431.311.585	4	10.134.602.669	1	5.401.924.317	1	5.498.263.804	1	1.203.436.752	1	1.544.253.047	1	888.091.005	1	1.704.396.046	1	5.391.011.730	100	98	5	15.525.614.399	500	57	Dinas Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	27.431.311.585	363	10.134.602.669	46	5.401.924.317	48	5.498.263.804	41	1.203.436.752	41	1.544.253.047	41	888.091.005	42	1.755.250.305	42	5.391.011.730	88	98	205	15.525.614.399	342	57	Dinas Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Person	90	4.294.136.600	94.17	1.153.121.550	80	688.093.100	80	761.286.850	25.00	99.784.151	50.00	173.958.222	75.00	120.229.995	100	289.671.612	100	683.643.586	125	90	194	1.836.765.130	216	43	Dinas Perikanan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	1.080.404.150	2	287.394.433	2	188.000.000	2	104.790.100	0	16.781.050	0	24.971.850	2	23.955.392	2	38.075.600	2	303.783.680	100	99	4	390.078.323	16	36	Dinas Perikanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	306.772.000	2	82.892.332	2	63.893.300	2	50.000.000	2	5.287.240	2	11.824.874	2	17.305.230	2	15.499.118	2	49.938.440	100	100	4	132.808.772	200	43	Dinas Perikanan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	50	125.800.000	7	30.600.000	10	25.200.000	10	25.200.000	4	1.450.000	13	6.950.000	13	4.200.000	13	10.500.000	13	23.300.000	130	92	20	53.700.000	40	43	Dinas Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	80	2.620.000.000	152.00	752.434.787	80	480.000.000	80	581.296.750	30	76.265.863	34	130.211.498	20	74.768.993	50	225.566.096	134	506.843.248	168	87	286	1.259.278.035	358	48	Dinas Perikanan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Person	85	3.098.000.000	85	307.686.866	78	667.500.000	78	520.200.000	65.11	5.466.165	65.11	1.852.743	90.78	289.736.243	92	183.191.265	90.78	480.246.416	118	94	176	797.933.282	207	26	Dinas Perikanan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	350	998.000.000	6	55.910.000	15	238.000.000	15	57.400.000	0	0	0	0	13	55.910.000	13	0	26	55.910.000	173	97	32	111.820.000	9	12	Dinas Perikanan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	197	1.500.000.000	8	388.468.866	20	402.500.000	20	388.800.000	0	5.466.385	0	1.852.743	15	170.516.243	12	393.191.265	27	371.026.426	135	95	35	559.493.282	10	37	Dinas Perikanan
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	1	25.000.000	15	63.330.000	1	47.000.000	1	74.000.000	0	0	0	0	1	63.330.000	0	0	1	63.330.000	100	86	16	126.620.000	1.600	506	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Person	80	3.917.864.100	96.49	1.674.039.862	77	737.272.200	77	949.254.233	25.00	212.791.682	50.00	248.605.301	75.00	223.883.610	100	246.281.643	100	931.762.237	130	98	195	2.608.805.899	246	67	Dinas Perikanan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Pemerintah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah						
							Rp (Renja)		Rp (P DPA)		I		II		III		IV												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11						13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12.1800,000	12	62.587,250	12	57.404,000	3	12.054,250	3	14.802,250	3	14.768,250	3	13.387,250	12	54.812,000	100	95	24	117.399,250	200	96	Dinas Perikanan		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	319.030,000	12	61.719,000	12	8.888,750	3	0	3	147,000	3	0	3	1.253,500	12	1.400,500	100	16	24	63.119,500	200	20	Dinas Perikanan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	40	3.476.854,320	38	1.549.733,412	38	695.872,200	38	882.961,483	40	200.737,433	40	233.856,051	40	209.115,360	40	231.840,893	40	97	78	2.425.293,140	395	70	Dinas Perikanan		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	253.000,000	97.44	397.339,408	77	405.000,000	77	266.093,067	30.38	16.194,096	53.16	55.193,559	84.81	59.283,459	92.41	130.887,762	92.41	261.558,876	120	98	190	658.898,284	237	260	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	390.000,000	37	336.149,408	48	390.000,000	48	222.093,067	17	35.794,096	17	43.593,559	34	50.943,469	34	307.323,762	34	237.654,876	71	98	71	553.804,284	348	293	Dinas Perikanan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	98	35.000,000	0	20.340,000	98	35.000,000	98	24.000,000	7	400,000	25	11.600,000	33	8.340,000	38	3.625,000	38	23.965,000	39	100	38	44.305,000	39	295.37	Dinas Perikanan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/	Unit	2	48.000,000	2	40.850,000	2	200.000,000	2	20.000,000	0	0	-	0	0	1	39.939,000	1	39.939,000	50	100	3	60.789,000	100	127	Dinas Perikanan	
Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	4.63	11.000.000,000	1.89	1.518.862,257	0.51	400.000,000	0.51	1.020.260,750	(83.28)	62.868,680	(54.28)	24.432,857	(25.40)	20.838,750	0.51	190.355,216	(144.44)	298.395,593	-31.692	29	-161	1.617.257,760	-3.472	17	Dinas Perikanan	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan	Persen	22.18	5.250.000,000	11.57	37.596,260	18.67	250.000,000	18.67	721.406,750	0	14.134,260	17.28	8.798,250	25.11	8.270,250	28.86	113.775,000	28.86	144.977,760	155	20	40	182.574,020	182	3	Dinas Perikanan	
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Nelayannya	Kelompok	115	1.675.000,000	20.00	37.596,260	20	250.000,000	20	721.406,750	0	14.134,260	-	8.798,250	2	8.270,250	18	113.775,000	20	144.977,760	100	20	40	182.574,020	35	13	Dinas Perikanan	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persen	0	2.200.000,000	0.00	92.465,443	0	150.000,000	0	298.854,000	0	48.734,420	0	15.634,607	1	12.568,500	0	76.480,216	1	153.417,743	0	51	1	245.883,186	0	11	Dinas Perikanan	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	350.000,000	0.00	92.465,443	1	350.000,000	1	298.854,000	0	48.734,420	0	15.634,607	1	12.568,500	0	76.480,216	1	153.417,743	100	51	1	245.883,186	100	164	Dinas Perikanan	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	7.14	6.912.581.422	5.41	2.362.071,688	1.33	1.393.790,711	1.33	1.326.116,180	(83.98)	13.273,500	(50.12)	13.843,625	(13.63)	29.888,175	4.66	1.318.806,449	-142	1.275.625,716	-16.682	96	-137	3.637.697,464	-1.914	53	Dinas Perikanan	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	2.111.000,000	25	30.175,946	14	50.000,000	14	17.980,000	3	4.055,750	7	6.083,625	8	6.083,625	3	0	21	16.223,000	150	90	46	46.398,946	49	2	Dinas Perikanan	
	Pemberian Pendampingan, Pengenhuan, Teknologi dan Reformasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Nelayan yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Kelompok	34	950.000,000	25	30.175,946	8	50.000,000	8	17.980,000	3	4.055,750	7	6.083,625	8	6.083,625	3	0	21	16.223,000	263	90	46	46.398,946	135	5	Dinas Perikanan	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.342.72	4.801.581,422	4.264.11	2.331.895,742	4.160.68	1.343.790,711	4.160.68	1.308.136,180	657.67	9.217,750	1.390.26	7.760,000	1.388.78	23.804,550	788.16	1.318.806,449	6.397.38	1.259.402,716	103	96	8.561	3.591.298,466	197	75	Dinas Perikanan	

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah	
									Rp (Renja)		Rp (P DPA)		I	II	III	IV														
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16														
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(sat u) Daerah Kabupat en/ Kot a	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (sat u) Daerah Kabupat en/ Kot a	Unit	15	2.231.581,422	2	1.157.390,147	3	593.790,711	3	331.990.000	0	0	0	7.760.000	0	899.050	3	317.883,766	3	326.542,816	100	98	5	1.483.932,963	33	66	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(sat u) Daerah Kabupat en/ Kot a	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (sat u) Daerah Kabupat en/ Kot a	Unit	2	1.680.000.000	11	1.174.505,595	2	750.000.000	2	976.146,180	0	9.217,750	0	18.748.300	0	22.905.500	2	900.736.650	2	951.608.200	100	97	13	2.126.113,795	650	127	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan	Persen	10	5.171,372,133	28.15	249,299,943	2.00	200.000.000	2.00	9.039,700	(92.10)	3.569,500	(70.26)	3.569,500	(22.48)	0	3.74	484.000	(98.31)	7.623,000	4.911	84	-70	256,922,943	-701	9	Dinas Perikanan	
		Pembinaan Mutu dan Keselamatan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	21.05	1.391,372,133	14.12	28,148,770	3.44	200.000.000	3.44	9.039,700	20.00	3.569,500	40.00	3.569,500	57.14	0	15.79	484.000	15.79	7.623,000	459	84	30	35,771,770	142	3	Dinas Perikanan	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Peryarat an atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Peryarat an Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	65	1.391,372,133	38.00	28,148,770	10	200.000.000	10	9.039,700	6	3.569,500	8	3.569,500	30	0	0	484.000	44	7.623,000	440	84	82	35,771,770	126	3	Dinas Perikanan	
		UTP BALAI BUDIDAYA																												Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	7.14	2.410.000.000	63.56	263,345,443	1.5	195.000.000	1.5	180.000.000	0	10.017,088	0	21.953,000	6.67	26.033,740	0	54,261,578	6.67	112,265,406	445	62	70	375,610,849	984	16	Dinas Perikanan	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi benih Ikan	Bkor	40000	2.410.000.000	30,000	263,345,443	25000	195.000.000	25000	180.000.000	0	10.017,088	0	21.953,000	40,000	26.033,740	0	54,261,578	40,000	112,265,406	160	62	70,000	375,610,849	175	16	Dinas Perikanan	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (sat u) Daerah Kabupat en/ Kot a	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (sat u) Daerah Kabupat en/ Kot a	Unit	2	1.345.000.000	2	263.345,443	2	195.000.000	2	180.000.000	0	10.017,088	3	21.953,000	0	26.033,740	0	54,261,578	3	112.265,406	150	62	5	375.610,849	250	28	Dinas Perikanan	

TABEL II.5.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 TRIWULAN I DAN II

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024				Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024				Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan I		Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP	78	15.105.822.108,00	0	2.166.778.527,00	0	2.867.845.936,00	0,00	14,34	0,00	18,99		SR		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	78	50.000.000,00	0	833.334,00	0	1.250.001,00	0,00	1,67	0,00	2,50		SR		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	2	50.000.000,00	0	833.334,00	0	1.250.001,00	0,00	1,67	0,00	2,50		SR		
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.324.705.908,00	100	2.073.497.421,00	100	2.612.986.206,00	117,65	28,31	117,65	35,67		SR		
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.275.658.408,00	1	1.713.009.261,00	1	1.831.184.820,00	100,00	32,47	100,00	34,71		SR		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	5.275.658.408,00	45	1.713.009.261,00	45	1.831.184.820,00	93,75	32,47	93,75	34,71		SR		
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	85	599.079.000,00	25	89.669.791,00	50	113.582.120,00	29,41	14,97	58,82	18,96		SR		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	104.100.000,00	2	16.755.395,00	2	19.386.320,00	100,00	16,10	100,00	18,62		SR		
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	45.000.000,00	2	6.287.476,00	2	7.010.200,00	100,00	13,97	100,00	15,58		SR		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	25.200.000,00	0	0,00	10	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	11,90		SR		
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	424.779.000,00	43	66.626.920,00	81	84.185.600,00	53,75	15,69	101,25	19,82		SR		
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	80	439.981.000,00	83,92	31.085.000,00	92,43	372.472.500,00	104,90	7,07	115,54	84,66		SR		
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	63.000.000,00	0	0,00	17	62.240.000,00	0,00	0,00	113,33	98,79		SR		
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	356.981.000,00	0	31.085.000,00	33	310.232.500,00	0,00	8,71	165,00	86,90		SR		
15	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SR		
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	78	796.888.500,00	25	210.838.901,00	50	240.220.599,00	32,05	26,46	64,10	30,14		SR		
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	54.529.000,00	3	9.921.500,00	3	13.595.250,00	25,00	18,19	25,00	24,93		SR		
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	20.759.500,00	3	0,00	3	453.000,00	25,00	0,00	25,00	2,18		SR		
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40	721.600.000,00	38	200.917.401,00	38	226.172.349,00	95,00	27,84	95,00	31,34		SR		
20	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	78	213.099.000,00	47,37	28.894.468,00	69,47	55.526.167,00	60,73	13,56	89,06	26,06		SR		
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	178.099.000,00	34	26.594.468,00	50	35.639.167,00	70,83	14,93	104,17	20,01		SR		
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	15.000.000,00	11	2.300.000,00	15	0,00	11,22	15,33	15,31	0,00		SR		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024				Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024				Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			
			K	Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan I		Triwulan II	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	20.000.000,00	0	0,00	1	19.887.000,00	0,00	0,00	50,00	99,44		SR		
24	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,13	3.630.690.100,00	0	18.089.694,00	1,38	41.484.498,00	0,00	0,50	122,12	1,14		SR		
25	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	136.700,23	3.378.341.000,00	21.455	10.687.000,00	62.333	25.943.250,00	15,69	0,32	45,60	0,77		SR		
26	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3,00	3.378.341.000,00	0	10.687.000,00	0	25.943.250,00	0,00	0,32	0,00	0,77		SR		
30	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1	252.349.100,00	1	7.402.694,00	1	15.541.248,00	100,00	2,93	100,00	6,16		SR		
31	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	252.349.100,00	1	7.402.694,00	1	15.541.248,00	100,00	2,93	100,00	6,16		SR		
33	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,46	2.607.624.900,00	0	43.829.680,00	0	69.567.875,00	0,00	1,68	0,00	2,67		SR		
34	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	21	249.187.900,00	9	7.660.050,00	16	15.868.075,00	42,86	3,07	76,19	6,37		SR		
35	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8	249.187.900,00	9	7.660.050,00	7	15.868.075,00	112,50	3,07	87,50	6,37		SR		
36	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.221,36	2.358.437.000,00	577	36.169.630,00	1.809	53.699.800,00	13,68	1,53	42,85	2,28		SR		
38	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,00	2.358.437.000,00	0	36.169.630,00	0	53.699.800,00	0,00	1,53	0,00	2,28		SR		
39	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2,00	902.067.700,00	2,00	15.731.898,00	2,00	50.799.454,00	100,00	1,74	100,00	5,63				
40	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	4,21	199.891.200,00	0	6.164.948,00	0	4.941.297,00	0,00	3,08	0,00	2,47		SR		
41	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15	199.891.200,00	0	6.164.948,00	0	4.941.297,00	0,00	3,08	0,00	2,47		SR		
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	6	702.176.500,00	0	9.566.950,00	0	45.858.157,00	0,00	1,36	0,00	6,53		SR		
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2	702.176.500,00	0	9.566.950,00	0	45.858.157,00	0,00	1,36	0,00	6,53		SR		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024				Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024				Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024			
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan I		Triwulan II	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
42	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,46	590.733.500,00	0	14.796.500,00	0	91.757.902,00	0,00	2,50	0,00	15,53		SR		
43	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	30000	590.733.500,00	0	14.796.500,00	0	91.757.902,00	0,00	2,50	0,00	15,53		SR		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	284.208.500,00	0	0,00	0	13.697.400,00	0,00	0,00	0,00	4,82		SR		
44	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	306.525.000,00	0	14.796.500,00	0	78.060.502,00	0,00	4,83	0,00	25,47		SR		
Rata-rata Program									371,27	8,18	56,63	13,27				
Rata-rata Kegiatan									38,41	8,54	53,24	18,24				
Rata-rata Sub kegiatan									34,22	7,91	55,45	22,68				

Permasalahan

1. Adanya pergeseran musim angin dan terjadinya cuaca Ekstrem beberapa bulan terakhir mempengaruhi produksi perikanan tangkap dan budidaya
2. Balai Benih Ikan belum memproduksi benih ikan dikarenakan masih dalam proses rehabilitasi kolam hatchery
3. Harga Pakan Ikan yang tinggi

Rekomendasi

- 1.a. Mengusulkan modernisasi sarana alat tangkap untuk mengetahui perkiraan cuaca sehingga operasional penangkapan ikan lebih efisiensi dan hasil yang optimal
- 1.b. Memberikan penyuluhan dalam mempertahankan kualitas air kolam sehingga menghindari terjadinya mortalitas pada ikan budidaya
2. Mempercepat proses pelaksanaan rehabilitasi dengan melakukan pengawasan secara berkala
- 3.a. Mengusulkan alat pembuat pakan untuk menurunkan biaya operasional budidaya ikan
- 3.b. Memberikan bantuan sarana budidaya berupa pakan ikan kepada kelompok budidaya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Dinas Perikanan memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran kinerja. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa jumlah produksi perikanan (jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya) yang menjadi tolak ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja dan nilai tukar nelayan. Pada Tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada capaian sasaran strategis meningkatnya ekonomi sektor perikanan dengan indikator kinerja produksi sektor perikanan tercapai sebesar 100,40% dengan jumlah 139.138,66 Ton, sedangkan produksi olahan produk perikanan sebesar 125,29% dengan jumlah 526,29 Ton.

Dalam mendukung keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022, ada 3 (tiga) program yang mendukung yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dimana program tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta ketersediaan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.6.
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2023

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	77 Persen	52.100.000,00	43.795.092,00	84,06
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	77 Persen	52.100.000,00	43.795.092,00	84,06
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	52.100.000,00	43.795.092,00	84,06
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	85 Persen	5.498.263.804,00	5.391.011.730,00	98,05
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	5.498.263.804,00	5.391.011.730,00	98,05
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	5.498.263.804,00	5.391.011.730,00	98,05
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	80 Persen	761.286.850,00	683.643.580,00	89,80
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	104.790.100,00	103.783.892,00	99,04
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	50.000.000,00	49.916.440,00	99,83
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	25.200.000,00	23.100.000,00	91,67

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 OK	581.296.750,00	506.843.248,00	87,19
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	76 Persen	520.200.000,00	492.007.095,00	94,58
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	57.400.000,00	55.910.000,00	97,40
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	388.800.000,00	372.787.095,00	95,88
	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	74.000.000,00	63.310.000,00	85,55
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	77 Persen	949.254.233,00	931.762.237,00	98,16
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	57.404.000,00	54.812.000,00	95,48
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	8.888.750,00	1.400.500,00	15,76
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	882.961.483,00	875.549.737,00	99,16
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	76 Persen	266.093.067,00	261.558.876,00	98,30
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	222.093.067,00	217.654.876,00	98,00
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit	24.000.000,00	23.965.000,00	99,85
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	19.939.000,00	99,70

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,51 Persen	1.020.260.750,00	298.395.503,00	29,25
	1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	18,67 Orang	721.406.750,00	144.977.760,00	20,10
	- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	721.406.750,00	144.977.760,00	20,10
	2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	0 Unit	298.854.000,00	153.417.743,00	51,34
	- Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	298.854.000,00	153.417.743,00	51,34
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,33 Persen	1.326.116.180,00	1.294.374.016,00	97,61
	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	14 Kelompok	17.980.000,00	16.223.000,00	90,23
	- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	17.980.000,00	16.223.000,00	90,23
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.160,68 Ton	1.308.136.180,00	1.278.151.016,00	97,71
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3 Unit	331.990.000,00	326.542.816,00	98,36
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Jenis	976.146.180,00	951.608.200,00	97,49
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2 Persen	9.039.700,00	7.623.000,00	84,33
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	3,44 Persen	9.039.700,00	7.623.000,00	84,33

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha	9.039.700,00	7.623.000,00	84,33
	JUMLAH			10.402.618.584,00	9.404.171.129,00	90,40

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian atau serapan anggaran Dinas Perikanan secara keseluruhan sebesar 90,40% atau dari anggaran yang tersedia. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan juga kegiatan yang sifatnya hanya penyediaan asuransi/jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan, apabila terjadi kematian atau kecelakaan kerja baru bisa terealisasi. Meskipun realisasi anggaran tidak tercapai 100%, pelaksanaan dan capaian target kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kerjasama baik internal Dinas Perikanan maupun dengan pihak lain seperti Penyuluh Perikanan Bantu dan instansi- instansi lainnya yang mendukung tercapainya target kinerja Dinas Perikanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menyusun perencanaan strategis dibutuhkan suatu gambaran yang jelas tentang kondisi daerah agar perencanaan suatu program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Informasi yang jelas akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kendala serta solusi dalam pembangunan terutama di bidang perikanan.

Dalam mencapai keberhasilan kinerja tentunya ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Isu-isu tersebut dapat dimasukkan dalam faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan kinerja serta solusi atau alternatif yang dapat diambil dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang sering muncul dalam mencapai keberhasilan kinerja yang dilakukan setiap tahunnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi serta kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan/Faktor Penghambat

- Kurangnya armada penangkapan ikan yang memiliki tonase yang besar.
- Masih rendahnya keterampilan dan keahlian nelayan lokal.
- Penggunaan alat tangkap yang masih tradisional.
- Kurangnya ketersediaan SPDN/SPBUN di kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kabupaten.
- Belum optimalnya pengelolaan atau pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang ada.
- Kurangnya ketersediaan pabrik es dan cold storage di kecamatan-kecamatan.
- Kurangnya keahlian bagi pelaku usaha budidaya.

- Belum adanya penerapan penggunaan benih/bibit ikan yang berstandar SNI.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya.
- Kurangnya minat pelaku usaha perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) untuk membentuk kelompok dalam menjalankan usaha.
- Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan.
- Masih maraknya pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tetangga.

2. Faktor Pendukung

- Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberian dana yang memadai. Banyak program yang diluncurkan dalam usaha memajukan sektor kelautan dan perikanan seperti :
 - Program PSKPT (Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang merupakan program yang sangat besar untuk membangun pelabuhan perikanan beserta seluruh fasilitas pendukung yang bersifat nasional;
 - Penetapan Kawasan Kampung Nelayan Maju (KALAJU);
 - Penetapan Kawasan Kampung Budidaya Kerapu.
- Adanya dukungan dari instansi – instansi terkait sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat berjalan baik;
- Peran Penyuluh Perikanan Bantu, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah hasil perikanan. Aktifitas para penyuluh yang sehari-hari mendampingi masyarakat di lapangan sangat membantu dalam meningkatkan usaha mereka dalam mengolah sumberdaya alam yang ada. Selain pendampingan usaha, para penyuluh juga mendampingi masyarakat dalam berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha.
- Besarnya potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Natuna.

3. Solusi/Alternatif Yang Dapat Dilakukan

- Perlunya armada penangkapan ikan dengan kapasitas tonase yang besar.
- Perlunya pelatihan keahlian dan keterampilan bagi nelayan lokal sehingga dapat bersaing dengan nelayan dari luar.
- Perlu adanya modernisasi alat tangkap untuk nelayan tradisional.
- Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberantas pelaku *illegal fishing*.
- Penataan kelembagaan dan pendataan potensi perikanan yang ada.
- Mengadakan pelatihan CBIB bagi pembudidaya ikan.
- Perlunya pelatihan atau bimtek manajemen usaha bagi nelayan, pembudidaya dan pengolahan.
- Meningkatkan keterampilan SDM, baik nelayan, pembudidaya, pengolahan, penyuluh dan ASN yang membidangi perikanan.
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada Kelompok
- Melaksanakan bimbingan teknis penerapan cara pengolahan ikan yang baik bagi UMKM/Pengolah Hasil Perikanan melalui kegiatan peningkatan mutu nilai tambah dan diversifikasi usaha.
- Fasilitasi pameran produk olahan hasil perikanan ke luar daerah untuk mempromosikan ragam dan jenis produk olahan unggulan perikanan Kabupaten Natuna.
- Bimbingan teknis pemasaran produk olahan hasil perikanan berbasis online marketplace atau website online.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan RPJMD. Renja Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan anggaran yang disediakan, karena penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Perikanan yang telah ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai upaya mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain kelembagaan yang ada di masyarakat, pemuda dan tokoh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didiskusikan kembali di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan. Pembahasan juga dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sesuai dengan misi Presiden yang termasuk dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan terutama bidang kelautan dan perikanan yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan harus juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia. Dimana dalam mencapai salah satu agenda pembangunan Presiden yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Dalam mencapai visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai misi :

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Kualitas RB di KKP

Untuk mencapai misi tersebut, terdapat beberapa tujuan yaitu:

- a. Optimalnya pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP
- b. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan KKP

Dilihat dari kebijakan nasional dalam pembangunan yang telah ditetapkan, serta Renstra Perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan dapat diselaraskan terutama untuk menunjang visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya memiliki tujuan untuk mengoptimalkana pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP, yang berkaitan dengan target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yaitu jumlah produksi perikanan yang terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta jumlah produksi olahan produk perikanan yang harus dicapai setiap tahunnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu). Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun yang telah direncanakan.

Dalam meningkatkan ekonomi sektor perikanan, target yang telah ditetapkan Dinas Perikanan pada Tahun 2025 dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan (Ton)	(Ton)	142.100,28
		Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	(Ton)	444,52
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Predikat/ Nilai	BB/79
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,50

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021– 2026 yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural*** yang dijabarkan dalam beberapa misi, Dinas Perikanan bertanggungjawab secara langsung untuk mencapai misi kedua yaitu ***Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan Meningkatkan perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan.***

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupten Natuna Tahun 2025 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Natuna ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini.

Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana yang terurai dibawah ini.

➤ **Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

Kegiatan :

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.

Kegiatan :

- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Kegiatan :

- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah menyusun kebutuhan anggaran guna mendukung capaian kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2023. Adapun kebutuhan anggaran Tahun 2023 yang telah disusun dapat dilihat pada tabel matrik Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 dibawah ini.

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						23.327.580.328,00							22.550.580.328,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						23.327.580.328,00							22.550.580.328,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						23.327.580.328,00							22.550.580.328,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	-			79 Nilai	8.556.603.728,00						-	8.756.789.617,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	-			79 Persen	73.750.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	54.700.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	19.050.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2: Pemban gunan Infra struktur Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Tepat Waktu	5.606.730.728,00			-	-	-	-	5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5.606.730.728,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.544.924.317,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	-			92 Persen	308.006.000,00			-	-	-	-	310.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	104.006.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		104.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	102.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.200.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	102.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		103.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	-			87 Persen	716.547.000,00			-	-	-	-	630.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	172.092.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		172.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	44.975.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	479.986.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		393.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				30 Dokumen	14.994.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah	-			83 Persen	931.457.000,00			-	-	-	-	1.138.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	309.385.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	282.284.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		289.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioediasi				20 Unit	319.788.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pamban gunan Infra struktur Wilayah	-		499.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Dioediasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	-			79 Persen	705.899.000,00			-	-	-	-	738.085.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	27.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dioediasi				12 Laporan	14.999.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dioediasi				40 Laporan	663.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		666.065.300,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	-			79 Persen	214.214.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pamban gunan Infra struktur Wilayah	-	-	244.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	179.880.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Pamban gunan Infra struktur Wilayah	-		181.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	14.570.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	19.764.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-			0,82 Persen	5.872.427.000,00						-	3.915.000.000,00	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	-			20,94 Persen	5.197.427.000,00			-	-	-	-	3.240.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				35 Orang	530.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		530.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				25 Kelompok	149.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				10 Unit Usaha	349.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				200 Unit	4.167.577.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-			1 Unit	675.000.000,00			-	-	-	-	675.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	675.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		675.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-			1,44 Persen	5.524.812.000,00						-	6.505.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Budidaya yang terbina	-			23 Kelompok	1.099.850.000,00			-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Peman gunan Infra struktur Wilayah	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				8 Kelompok	849.900.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Peman gunan Infra struktur Wilayah	-		1.350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	249.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-			4.282,04 Ton	4.424.962.000,00			-	-	-	-	4.905.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	380.000.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		380.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	2.570.002.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peman gunan Infra struktur Wilayah	-		3.050.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	1.474.960.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Infrastr uktur Wilayah 2. Peman gunan Infra struktur Wilayah	-		1.475.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	-			2,00 Persen	3.373.737.600,00						-	3.373.790.711,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	-			4 unit	159.998.000,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	159.998.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	-			4,98 Persen	179.950.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				15 Unit Usaha	179.950.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Bahan baku Industri pengolahan Ikan	-			6 Jenis	3.033.799.800,00			-	-	-	-	3.033.799.711,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5819,50 Ton	303.790.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		303.790.711,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	2.729.999.800,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.730.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			J U M L A H					23.327.580.328,00							22.550.580.328,00	

TABEL IV.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
UPTD BALAI BENIH IKAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD BALAI BENIH IKAN						800.000.000,00							815.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						800.000.000,00							815.000.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						800.000.000,00							815.000.000,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-			1,44 Persen	800.000.000,00						-	815.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	+			35000 Ekor	800.000.000,00			+	+	+	+	815.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	149.816.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	650.184.000,00	Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	+	-	+		800.000.000,00	UPTD BALAI BENIH IKAN
		J U M L A H						800.000.000,00							815.000.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas Dinas Perikanan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat administrator, pengawas dan fungsional di Dinas Perikanan agar dapat mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja Tahun 2025 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Perikanan diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Perikanan Tahun 2025, maka penetapan

prioritas pembangunan pada urusan pemerintahan pilihan bidang perikanan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang telah ditetapkan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PERIKANAN
TAHUN : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2.1.1.1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	Ton	444,52
		Produksi Sektor Perikanan (Ton)	Ton	142.100,28
6.1.1.1.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai LAKIP	Nilai/Predikat	79,00
6.1.1.2.1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.49

Ranai, 30 Agustus 2024

Kepala Dinas Perikanan



MADISURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PERIKANAN
TAHUN : 2025

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
01.01.	DINAS PERIKANAN				
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
		Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2
		Outcome	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	5.544.924.317
		Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	55
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	172.100.000
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	45.000.000
		Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	5.200.000
		Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		0
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	372.500.000
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	27.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	15.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	696.065.300
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	40
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	181.000.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	192
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85
03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	1.585.000.000
		Output	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Ada/Tidak	12
		Output	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Paket	53
		Output	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	3
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1
03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	530.000.000
		Output	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	35
		Output	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Paket	1
		Output	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Unit	20
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1
03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	150.000.000
		Output	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	25
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	1
03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				
03.3.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	850.000.000
		Output	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Ekor	10
		Output	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	8
		Output	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Paket	2
		Output	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Tahun	1
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1
04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	1.400.000.000
		Output	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	6
		Output	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1
06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				
06.2.02.02.	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	180.000.000
		Output	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	15
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	2
06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	2.930.000.000
		Output	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	M1 (Meter Lari)	200
		Output	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Paket	14
		Output	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2
		Output	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Unit	12

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Unit Usaha	2
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	2
01.02.	UPT BALAI BENIH IKAN				
04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	800.000.000
		Output	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ekor	8.000
		Output	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	5
		Output	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tahun	1
		Outcome	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1

Ranai, 30 Agustus 2024

Kepala Dinas Perikanan



HADI SURYANTO, S. Pi, M. Si
NIP. 19750106 200012 1 005